

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM E-WARONG KUBE PKH KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF E-WARONG KUBE PKH PROGRAM IN WIROBRAJAN DISTRICT YOGYAKARTA CITY

Oleh: Wia Desi Mirawati dan Lena Satlita, M.Si

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, mirawati.19.mw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses *collaborative governance* dalam pengembangan program E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta beserta faktor penghambatnya. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam pengembangan program E-Warong KUBE PKH Kecamatan Wirobrajan sudah dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sesuai dengan 5 indikator yang ada yaitu *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding* dan *intermediate outcome*. *Collaborative governance* yang dilakukan sudah optimal hanya saja masih terdapat masalah yang menghambat pengembangan program E-Warong KUBE PKH seperti sarana dan prasarana dari Bank BNI yang kurang memadai, kewenangan belum sepenuhnya di Bank BNI daerah, keterlibatan swasta yang belum maksimal, dan masih terdapat RPK (agen) yang melayani pencairan bantuan pangan non tunai (BPNT)

Kata Kunci: *collaborative governance*, E-Warong KUBE PKH

ABSTRACT

The research aimed to know deeply understand the collaborative governance process in development of E-Warong KUBE PKH program in Wirobrajan District Yogyakarta City and its inhibiting factors. The research design used was descriptive with qualitative approach using primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, documentation. The technique of checking the validity of data is done by source triangulation. Data analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, data presentation, conclusions and verification. The results showed that collaborative governance process in the development of E-Warong KUBE PKH program in Wirobrajan District Yogyakarta City that was done by government, private, and community already in accordance from the 5 indicators is face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, intermediate outcomes. Collaborative governance process has been done optimally, but there are still problems that hamper the development program such as inadequate bank facilities and infrastructure, the BNI Bank's authority is not yet full in the regional BNI Bank, private involvement that has not maximum.

Keywords: *collaborative governance*, E-Warong KUBE PKH

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana orang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, papan dan pangan, pendidikan, serta mendapatkan kesehatan yang layak. Hall dan Midgley (dalam Supriyana 1997:89) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi deprivasi materi sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lain dalam masyarakat. Masalah kemiskinan menjadi masalah global yang dihadapi negara-negara berkembang yang ada di dunia, untuk itu kemiskinan menjadi masalah serius yang harus segera diselesaikan. Upaya pengentasan kemiskinan menjadi target utama untuk memperbaiki ekonomi negara-negara berkembang di dunia. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam suatu negara maka kesejahteraan masyarakat juga akan membaik. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dijadikan gambaran keberhasilan negara dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan suatu negara.

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pada bulan September 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah kemiskinan) mencapai 25,67 juta orang atau 9,66 persen dari jumlah penduduk di Indonesia (<https://www.bps.go.id>). Kemiskinan ini disebabkan oleh kualitas sumberdaya manusia yang kurang

memadai sehingga tidak mampu bersaing dalam dunia global. Hal ini menyebabkan masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan di Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemiskinan dan kerentanan pangan merupakan masalah yang dihadapi Indonesia dari masa ke masa yang belum bisa di selesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program terpadu dan berkelanjutan.

Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu gagasan yang telah digagas oleh pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, secara tegas disebutkan bahwa anak terlantar dipelihara oleh negara, dengan demikian negara mempunyai kewajiban untuk menanggulangi kemiskinan yang dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat yang memiliki perekonomian rendah. Permasalahan kemiskinan harus menjadi target penting bagi negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan pemerataan pembangunan yang pada dasarnya memiliki tujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sejak tahun 1970 Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan banyak sekali program dalam upaya pengentasan kemiskinan yang di terbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dari tahun 1970-sekarang.

Tabel 1
Program pengentasan kemiskinan yang di keluarkan oleh Kementerian Sosial dari tahun 1970-Sekarang

No	Nama Program	Tahun
1	Program keluarga muda mandiri	1970-1998
2	Tabungan kesejahteraan keluarga (Takesra) dan kredit usaha kesejahteraan keluarga (Kuesra)	1970-1998
3	Beras subsidi untuk masyarakat	1998-1999
4	Program jaringan penyelamat sosial	1998-1999
5	Program padat karya	1988-1999
6	Program pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin	2000-2001
7	Program listrik murah untuk rumah tangga miskin	2001-2004
8	Program subsidi untuk masyarakat kurang mampu	2001-2004
9	Program subsidi Bunga untuk program kredit usaha mikro	2001-2004
10	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri	2004-2014
11	Program Keluarga Harapan (PKH)	2004-sekarang
12	Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)	2004-2014
13	Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)	2004-2014
14	Program Jamkesmas	2004-2014
15	Program Dana Desa	2014-sekarang
16	Program Bantuan Pangan Non Tunai	2014-sekarang
17	Program E-Warong KUBE PKH sejahtera	2016-sekarang

Sumber : (liputan 6 sctv yang diolah peneliti)2018

Sejak tahun 1970 banyak program yang diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan, program-program tersebut belum semua optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan int terlihat dari jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang masih tinggi. Dengan demikian pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan program terbarunya untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH). Program E-Warong KUBE PKH merupakan hasil kerjasama Kementerian Sosial Republik Indonesia

dengan bank pelaksana (bank himbara, badan logistic, koperasi dan masyarakat untuk pendistribusian bantuan sosial PKH secara nontunai. Pada tahun 2017 Kementerian Sosial Republik Indonesia telah berhasil membuka 3500 unit E-Warong KUBE PKH yang tersebar di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia (kementriansosial.co.id). salah satu kota yang sudah menerapkan program E-Warong KUBE PKH adalah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data (<https://www.bps.go.id>), menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta pada periode 2016-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta
pada periode 2016-2018

Tahun	Periode	Jumlah Warga Miskin	Dalam persen
2016	Maret	513,2	13,34
	September	494,91	13,10
2017	Maret	488,53	13,02
	September	466,33	12,80
2018	Maret	460,10	12,13
	September	450,25	11,81

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu 3 tahun telah terjadi penurunan kemiskinan sebesar 1,53 % yaitu dari 513,2 ribu jiwa menjadi 450,25 ribu jiwa. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut, dipengaruhi oleh program-program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang di terapkan di Kota Yogyakarta adalah program E-Warong KUBE PKH. Untuk mengoptimalkan program Bantuan Pangan Non Tunai pemerintah Kota Yogyakarta mulai mengembangkan program E-Warong KUBE PKH

Program E- Warong KUBE PKH Kota Yogyakarta diresmikan pada bulan Juni 2017 sesuai instruksi dari Kementerian Sosial yang tertuang pada Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui E-Warong KUBE PKH. Jumlah E-Warong KUBE PKH Kota Yogyakarta ialah 25 yang tersebar dalam setiap kecamatan. Berikut adalah daftar jumlah E-Warong KUBE PKH Kota Yogyakarta setiap kecamatan.

Tabel 3
Jumlah E-Warong KUBE PKH Kota
Yogyakarta

No	Nama Kecamatan	Jumlah e- Warong
1.	Danurejan	2
2.	Gedongtengah	2
3.	Gondomanan	1
4.	Gondokusuman	2
5.	Jetis	3
6.	Kotagede	1
7.	Kraton	2
8.	Mantrirejan	2
9.	Mergangsan	2
10.	Ngampilan	1
11.	Pakualaman	1
12.	Tegalrejo	3
13.	Umbulharjo	2
14.	Wirobrajan	2

(Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2018)

Kecamatan Wirobrajan merupakan salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta yang menerapkan Program E-Warong KUBE PKH. E-Warong KUBE PKH Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta berjalan atas beberapa aktor utama yaitu Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Bank BNI, Koperasi BINUS Kota Yogyakarta, Pemerintah Kecamatan Wirobrajan, Pendamping E-Warong KUBE PKH Kecamatan Wirobrajan, Penyelia E-Warong KUBE PKH Wirobrajan, dan masyarakat penerima KPM. Masing-masing *stakeholder* memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling berkesinambungan yaitu sebagai berikut :1) Dinas Sosial Kota Yogyakarta bertindak sebagai turunan dari Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan program E-Warong Kube PKH Kota

Yogyakarta: standardisasi produk Kube produksi; 2) Bank BNI Daerah, berperan dalam memfasilitasi transaksi E-Warong daerah dengan mengaktifkan kartu, mencetak buku tabungan, mengedukasi operator E-Warong dan menyelesaikan segala keperluan administratif terkait E-Warong sebagai agen Bank dan penerima kartu; 3) Koperasi Binus berkoordinasi untuk menyediakan barang bagi E-Warong sesuai pemesanan pengurus E-Warong KUBE PKH Kecamatan Wirobrajan ; 4) Masyarakat penerima KPM Kecamatan Wirobrajan mempunyai peran sebagai penerima bantuan sosial dan bertugas mengembangkan E-Warong KUBE PKH yang sudah berdiri sebagai pengurus E-Warong KUBE PKH Kota Yogyakarta. 6) pendamping sosial memiliki peran dalam mencari dan mengusulkan calon E-Warong KUBE PKH , mempersiapkan proposal, memberi sosialisasi mengenai program E-Warong KUBE PKH kepada kelompok PKH, melakukan pendataan dan membantu KPM dalam mengisi formulir bank dalam rangka mendapatkan kartu KKS dan menerima pengaduan dari pengelolaan E-Warong KUBE PKH.

Namun, dalam pengembangan program E-Warong KUBE PKH Kecamatan Wirobrajan ini masih terdapat berbagai masalah seperti tidak tepatnya sasaran penerima program E-Warong KUBE PKH di Kecamatan wirobrajan karena data yang digunakan menggunakan dari BPS yang belum di perbaharui, kurangnya edukasi tentang E-Warong KUBE PKH kepada pengurus dan masyarakat pengguna E-Warong KUBE PKH di kecamatan Wirobrajan, kurangnya sarana prasarana untuk menunjang pengembangan program E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Wirobrajan, dan lokasi

E-Warong KUBE PKH yang kurang strategis dan masih berdekatan dengan warung warung milik masyarakat.

Pengembangan Program E-Warong KUBE PKH ini memerlukan kolaborasi antar aktor. Partisipasi aktif antar aktor sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam pengembangan E-Warong KUBE PKH Kecamatan Wirobrajan. Beberapa instansi yang terlibat harus memiliki tujuan bersama. Dalam pelaksanaan program E-Warong KUBE PKH Kota Yogyakarta terlihat adanya kolaborasi antar aktor, berikut adalah kolaborasi yang terjadi antar *stakeholder* dalam pelaksanaan program E-Warong KUBE PKH Kota Yogyakarta:



Gambar 1

Kolaborasi antar *stakeholder*

Sumber : Dinas Sosial Kota Yogyakarta 2018

Pada pelaksanaannya, kolaborasi yang terjalin antara instansi pemerintah dengan non instansi pemerintah dalam pengembangan E-Warong KUBE PKH Kecamatan Wirobrajan sudah berjalan tetapi ada sedikit permasalahan seperti pihak Bank dan Kemensos yaitu data dari kemensos yang dikirim ke perbankan yang masih perlu divalidasi. Padahal, menurut

Bambang selaku Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam wawancara dengan *tribunnews.com* seharusnya bank sudah tidak perlu lagi melakukan validasi ulang data yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Selain itu soal registrasi dengan bank yang belum efektif sebab, untuk mendapatkan kartu dari bank atau terdapat masalah dengan kartu, KPM masih mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan pada kartu tersebut karena permasalahan pada kartu harus diselesaikan di bank pusat. Dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan *collaborative governance*.

Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan program E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta sudah berjalan. Penelitian *collaborative governance* dalam pengembangan program E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi masing-masing aktor dalam pengembangan program E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dan faktor penghambat yang ada dalam pengembangan program.

Menurut DeSeve tahun 2007 untuk mengukur keberhasilan *collaborative governance* dapat diukur melalui delapan indikator yaitu 1) *network structure*, 2) *Commitment to a common purpose*, 3) *Trust among the participants*, 4) *Governance*, 5) *Access to authority*, 6) *Distributive accountability* atau *responsibility*, 7) *Information sharing* dan 8) *Access to resources*

Proses *collaborative governance* melalui beberapa tahapan. Morse and

Stephens (2012:567) membagi tahapan *collaborative governance* ke dalam 4 tahapan, yaitu :

1. *Assessment* (Penilaian)
2. *Initiation* (Inisiasi)
3. *Deliberation* (Musyawarah)
4. *Implementation* (Implementasi).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator *collaborative governance* dari Anshell dan Gash tahun 2007 yaitu : (1) *Face To Face Dialogue* (Dialog/Tatap Muka), (2) *Trust A Building* (Membangun Kepercayaan), (3) *Commitment To Process* (Komitmen Bersama), (4) *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama), (5) *Intermedite Outcame* (Pencapaian Hasil).

Teori *collaborative governance* dari Ansell and Gash (2007 :550) dipilih karena dalam penelitian ini, ingin mengetahui dan memahami bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengembangan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran, masukan dan rekomendasi kepada *stakeholder* yang terlibat untuk lebih meningkatkan peran masing-masing dalam pelaksanaan program.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di E-warong KUBE PKH Kecamatan Wirobrajan dan Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah staff Penyuluh Sosial Dinas

Sosial Kota Yogyakarta, Ketua Pengurus E-Warong KUBE PKH Wirobrajan Kota Yogyakarta, Staff dari Bank BNI DIY, Masyarakat Penerima KPM Wirobrajan Kota Yogyakarta, Pendamping PKH Kota Yogyakarta, Pendamping dan Penyelia E-Warong KUBE PKH, Manajer Koperasi Binus Kota Yogyakarta, TKSK Kecamatan Wirobrajan.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dilengkapi pedoman wawancara dan observasi. Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2014: 157) berpendapat bahwa sumber data utama penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, ditambah dengan data pendukung berupa dokumentasi, dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian secara langsung melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa laporan bulanan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Wirobrajan yang diterbitkan setiap bulan oleh E-Warong untuk disampaikan ke Dinas sosial Kota Yogyakarta, Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui E-Warong KUBE PKH, Data dari BPS tentang tingkat kemiskinan di Indonesia dan di Kota Yogyakarta dari tahun 2016-2018, dokumentasi peneliti saat melakukan penelitian dan dokumentasi kegiatan dalam pengembangan program E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Wirobrajan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik yang meliputi:

1. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dimana wawancara menggunakan pertanyaan terbuka disertai dengan batasan tema dan alur pembicaraan yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun. Pada saat wawancara di lapangan, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sebagai improvisasi dari respon yang diberikan oleh subjek penelitian.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi pasif dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang sedang diamatinya. Kemudian hasil observasi tersebut ditulis dalam sebuah catatan lapangan sebagai sumber informasi untuk diolah menjadi salah satu bahan analisis dalam penelitian ini. Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan pengamatan di lapangan terkait hal-hal yang berhubungan dengan program E-Warong KUBE PKH Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian. Peneliti memiliki dokumentasi seperti foto-foto kegiatan pengembangan program E-warong KUBE PKH di Kecamatan Wirobrajan, Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui E-Warong KUBE PKH. Laporan bulanan E-

Warong KUBE PKH yang diterbitkan setiap bulan untuk diserahkan pada Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 246) yang menjelaskan bahwa analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis tersebut terdiri dari pengumpulan data, teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Ilmu administrasi Publik terdapat pendekatan yang sesuai untuk menganalisis hubungan antar *stakeholder* dalam suatu pemerintahan yang disebut *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan interaksi atau kerjasama yang saling menguntungkan antar aktor baik pemerintah maupun non pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah publik secara bersama-sama karena adanya persamaan visi yang apabila dilakukan secara sendiri-sendiri akan terasa sulit. Menurut Ansell dan Gash dalam Sudarmo (2011:101) kolaborasi dalam arti proses dan dalam arti normatif.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan program E-Warong KUBE PKH Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dapat dikategorikan kedalam kolaborasi dalam arti proses. Hal ini dikarenakan kolaborasi yang dilakukan secara interaktif antar aktornya dan cenderung bersifat

formal bukan hanya berperilaku saja. Selain itu peneliti di sini berusaha untuk menganalisis atau meneliti proses kolaborasi di antara pemerintah dan instansi-instansi terkait untuk secara efektif melaksanakan perkembangan program E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Dilatarbelakangi oleh pentingnya mengoptimalkan bantuan pangan non tunai dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Wirobrajan perlu dilakukan pengembangan program E-Warong agar dapat menunjang optimalisasi bantuan pangan non tunai dan pemberdayaan masyarakat agar dapat terentaskan dari garis kemiskinan. Seperti yang dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Handika (2017) bahwa optimalisasi bantuan pangan non tunai dapat dilakukan jika E-Warong berkembang dengan baik. Selain dapat mengoptimalkan bantuan pangan non tunai E-Warong juga dapat menjadi sarana pemasaran hasil KUBE produksi sehingga masyarakat akan mendapatkan penghasilan tambahan sehingga E-Warong KUBE ini dapat dikatakan sebagai wadah dari pemberdayaan masyarakat. Disebutkan dalam penelitian Handika (2017) bahwa dalam pengembangan program E-Warong KUBE PKH keseluruhan terkait hubungan kerjasama antara Dinas Sosial dan pihak yang berkepentingan seperti Bank BNI, Koperasi BINUS dan KUBE Jasa berjalan dengan baik. Hubungan kerjasama antar Dinas Sosial dan Bank BNI hanya sebatas memberikan data jumlah peserta KPM, kemudian menyerahkan anggaran bantuan sosial, selanjutnya Bank BNI akan membuka tabungan, dan terakhir membagikan kartu tersebut kepada masing-masing peserta penerima manfaat.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan program E-Warong KUBE PKH tidak hanya dilakukan oleh satu *stakeholder* saja sehingga diperlukan keterlibatan dari berbagai *stakeholder* yang memiliki kewenangan yang sama dalam pengembangan E-Warong KUBE PKH Wirobrajan. Pengembangan program yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Pemerintah Kecamatan Wirobran. Sedangkan keterlibatan swasta yaitu dari Bank BNI, Koperasi BINUS Kota Yogyakarta serta dari pihak masyarakat yaitu pengurus E-Warong KUBE PKH Wirobrajan (KUBE Jasa), Pendamping Sosial, Masyarakat penerima KPM di Kecamatan Wirobrajan. Kolaborasi sudah terjadi pada pengembangan program E-Warong KUBE PKH Wirobrajan akan tetapi proses *collaborative governance* dalam pengembangan program E-Warong KUBE PKH Wirobrajan yang meliputi keterlibatan aktor yang kurang menyeluruh, terutama keterlibatan swasta. Penelitian ini menganalisis proses dari pengembangan program E-Warong KUBE PKH Wirobrajan serta hambatan yang terjadi dalam proses *collaborative governance*. Proses *collaborative governance* dalam pengembangan E-Warong KUBE PKH Wirobrajan menurut Ansell and Gash (2017) meliputi *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *shared understanding* (saling memahami) dan *intermediate outcomes* (hasil sementara) Adalah sebagai berikut :

a. *Face to dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Menurut Ansell and Gash *Collaborative governance* dibangun melalui proses dialog tatap muka antar

pemangku kepentingan untuk mencapai sebuah konsensus dan bukan keuntungan yang diperoleh dari masing-masing *stakeholder*. Dialog tatap muka ini merupakan proses membangun *trust*, sikap saling menghormati, sikap saling memahami dan komitmen pada proses. Dalam membangun *trust*, saling menghormati, sikap saling memahami dan komitmen terhadap proses dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan langsung seluruh *stakeholder* dalam sebuah kolaborasi. Menurut penelitian terdahulu oleh Davi Arianti (2018) yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtoharogo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, bahwa *Face to face dialogue* (dialog tatap muka) yang dilakukan antar *stakeholder* berupa pelatihan maupun sosialisasi. Pelatihan dan sosialisasi ini dilakukan oleh masing-masing instansi yang terkait sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Sama halnya dalam penelitian ini yaitu tentang *collaborative governance* dalam pengembangan program E-Warong KUBE PKH Wirobrajan bahwa dalam *face to face dialogue* (dialog tatap muka) yang dilakukan antar *stakeholder* adalah berupa rapat untuk seluruh *stakeholder*, rapat pengurus E-Warong dan pendamping E-Warong serta penyelia E-Warong, diadakanya pelatihan, *workshop*, dan sosialisasi untuk pengurus E-Warong. Rapat seluruh *stakeholder* dilakukan dalam satu bulan sekali untuk membahas perkembangan E-Warong baik itu untuk mengevaluasi kegiatan dalam bulan sebelumnya, penyelesaian masalah yang terjadi pada bulan sebelumnya, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan selanjutnya

b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Menurut Ansell dan Gash (2017) kurang adanya kepercayaan antara pemangku kepentingan ialah titik awal untuk *collaborative governance*. Karena proses kolaborasi tidak hanya tentang negosiasi tetapi tentang membangun kepercayaan diantara *stakeholder*. Menurut De Seve dalam Sudarmo (2011:110) *Trust among the participants* didasarkan pada hubungan profesional atau sosial; keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari *stakeholder* lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintahan, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka memenuhi mandat legislatif atau regulatori dan bahwa mereka percaya terhadap *partner-partner* lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, misalnya) dan *partner-partner* di luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah disetujui bersama. Pada penelitian terdahulu oleh Davi Arianti (2018) yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtoharogo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, bahwa membangun kepercayaan diantara, pemerintah, swasta, pengurus E-Warong maupun masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dan koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam program. Komunikasi serta koordinasi dilakukan agar tujuan dalam pengembangan Konservasi mangrove Baros dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Sama halnya dengan penelitian ini, cara membangun kepercayaan antar *stakeholder* terkait pengembangan E-Warong KUBE PKH Wirobrajan dengan membangun komunikasi yang baik dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi untuk membangun kepercayaan dalam Pengembangan E-Warong KUBE PKH Wirobrajan sudah dilakukan dengan baik. Komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam program. Hanya saja dari pihak Bank BNI terkadang mengambil keputusan sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa memberi informasi ke *stakeholder* yang lain sehingga akan menimbulkan permasalahan.

c. *Commitment to Process*

Menurut Ansell dan Gash (2017) Komitmen merupakan aspek yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan dalam proses *collaborative governance*. menurut Ansell dan Gash tidak ingin kepentingan mereka diabaikan atau sekedar mengamankan posisi mereka. Namun sebaliknya, sesungguhnya komitmen adalah sebuah keyakinan bahwa dengan *collaborative process* akan menciptakan keuntungan untuk masing-masing pihak dan kepentingan publik. Komitmen untuk proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan adalah cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan. Prosedur yang jelas, adil dan transparan sangat penting untuk komitmen. Pembentukan komitmen dalam proses *collaborative governance* dapat dilakukan dengan menetapkan prosedur atau aturan kolaborasi yang disetujui oleh seluruh *stakeholder*, prosedur dan aturan kolaborasi untuk seluruh *stakeholder* ini dapat diinisiasi oleh pemerintah dan

disetujui oleh seluruh *stakeholder* yang ada dalam suatu kolaborasi.

Dalam penelitian terdahulu oleh Davi Arianti (2018) yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtoharogo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, proses kolaborasi dalam pengembangan konservasi mangrove Baros dalam hal ini komitmen terhadap proses yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat memiliki tujuan untuk pengembangan konservasi mangrove Baros yaitu pelestarian mangrove yang memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar, dengan pelaksanaan masing-masing pelaksanaan *stakeholder* sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Pada penelitian ini dalam pengembangan E-Warong KUBE PKH Wirobrajan, tentunya diperlukan komitmen yang kuat diantara para *stakeholder* yang terlibat. Setiap *stakeholder* mempunyai cara berkomitmen sendiri-sendiri dalam menjalankan tujuan guna mengembangkan program E-Warong KUBE PKH sebagai upaya pengentas kemiskinan. *Stakeholder* yang terlibat dalam program E-Warong Kube PKH Wirobrajan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengembangkan program E-Warong KUBE PKH Wirobrajan sebagai upaya pengentas kemiskinan. Namun, dalam pelaksanaannya memiliki cara yang berbeda sesuai tupoksinya masing-masing. Komitmen yang berjalan sudah efektif baik antar kelompok maupun antar individu. Dari masing-masing instansi yang sudah sadar dalam menjalankan tugasnya maupun tanggungjawab tetap mengedapkan tujuan dari program. Tetapi, dalam proses kerjasama antar *stakeholder* belum

berjalan dengan baik karena dari pihak BNI sangat rendah dalam melakukan komunikasi dan koordinasi terkait pengembangan program E-Warong KUBE PKH Wirobrajan.

d. *Shared Understanding*

Ansell dan Gash (2017) mendefinisikan *shared understanding* merupakan kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Dalam proses *collaborative governance*, harus memiliki pemahaman bersama tentang tujuan bersama. *Shared understanding* yang baik dapat dilihat dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam proses *collaborative governance* dapat memahami apa yang menjadi tujuan bersama dalam melakukan kolaborasi. Ketika seluruh *stakeholder* yang terlibat sudah memahami apa tujuan dari proses *collaborative governance* yang dilakukan maka tidak akan terjadi bias tujuan dalam melakukan kolaborasi.

Pada penelitian terdahulu oleh Davi Arianti (2018) yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtoharogo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, bahwa *shared understanding* dilakukan dengan proses sosialisasi dan pelatihan sehingga masing-masing *stakeholder* akan memahami tugasnya masing-masing dalam menjalankan berdasarkan tupoksinya.

Pada penelitian ini dalam pengembangan E-Warong KUBE PKH Wirobrajan kesepemahaman bersama sudah optimal. Masing-masing *stakeholder* sudah memahami tujuan bersama dalam pengembangan E-Warong KUBE PKH Wirobrajan meskipun masing-masing *stakeholder* mempunyai cara masing-masing untuk mewujudkan tujuan tersebut

sesuai tupoksi yang di miliki masing-masing *stakeholder*. Hanya saja da beberapa *stakeholder* seperti Bank BNI yang memberikan sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu Mesin EDC yang cenderung eror atau tidak tersambung dengan jaringan; Kartu KKS eror dan tidak adanya upaya dari Bank BNI untuk mengatur mekanisme pencairan bantuan sosial non tunai.

e. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Menurut Ansell dan Gash (2017) Hasil sementara dapat dikatakan konkrit apabila adanya keberhasilan dari proses kolaborasi. Meskipun hasil sementara merupakan *output* atau keluaran nyata, namun proses *outcomes* tersebut merupakan esensi untuk membangun sebuah momentum yang dapat mengarahkan *collaborative governance* yang sukses. Dalam proses ini tidak dapat digeneralisir sebagai hasil akhir yang dicapai. *Intermediate outcomes* merupakan hasil yang didapatkan setelah adanya proses kolaborasi yang nantinya setelah ditetapkan secara jangka panjang maka diperoleh suatu hasil akhir.

Pada penelitian terdahulu oleh Davi Arianti (2018) yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtoharogo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah pengembangan konservasi mangrove Baros yang beriringan dengan pemberdayaan masyarakat serta pelestarian alam.

Pada penelitian ini dalam pengembangan Program E-Warong KUBE PKH Wirobrajan tujuan dari pengoptimalan penerimaan bantuan sosial secara non tunai kepada pihak yang masuk dalam KPM, dan pemberdayaan

masyarakat sudah mulai terlaksana. Tujuan diselenggarakannya E-Warong KUBE PKH Wirobrajan sudah mulai terlaksana, karena penyaluran bantuan program BPNT sudah dapat di cairkan melalui E-Warong. Meskipun terdapat keterlambatan atau penundaan dikarenakan mesin EDC dan KKS yang sering eror sehingga mengakibatkan peserta KPM harus menunggu pencairan dana program BPNT. Tujuan dari E-Warong sudah mulai berjalan tapi belum optimal. Ini terlihat dari penyairan bantuan pangan non tunai yang belum mencapai target yaitu target untuk perbulanya adalah 1000 KPM tetapi yang mencairkan BPNT di E-Warong KUBE PKH hanya 500 KPM per bulanya. Berikut adalah data jumlah KPM yang mencairkan BPNT di E-Warong dan jumlah keluarga yang mendapatkan KPM.

Tabel 4
Jumlah Peserta KPM Di Kecamatan Wirobrajan Tahun 2018

No	Kelurahan di Kecamatan Wirobrajan	Jumlah
1	Kelurahan Pakuncen	630
2	Kelurahan Patangpuluhan	362
2	Kelurahan Wirobrajan	458
Jumlah		1450

Sumber : Instrumen Dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai, 2018

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa penerima KPM di Kelurahan Pakuncen sebanyak 630, Kelurahan Patangpuluhan 362, Kelurahan Wirobrajan 458 jadi total penrima KPM di Kecamatan Wirobrajan adalah 1450. Sedangkan untuk penyaluran bantuan pangan non tunai di Kecamatan Wirobrajan hanya kurang lebih 500 KPM per bulanya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5
Jumlah Penyaluran BPNT di E-Warong KUBE PKH Wirobrajan, bulan Maret 2019

No	E-Warong KUBE	Kapasitas Layanan (KPM/hari)	Total Penyaluran
1	KUBE PKH Wirobrajan	100 paket	492
2	Kube PKH Jetis	100 paket	572
3	Kube PKH Gondokusuman	100 Paket	407

Sumber: Hasil temuan di Lapangan, 2019

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Collaborative governance process dalam pengembangan E-Warong KUBE PKH Wirobrajan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Pemerintah Kecamatan Wirobrajan, Bank BNI Daerah Istimewa Yogyakarta, Koperasi BINUS Kota Yogyakarta, Pendamping Sosial E-Warong KUBE PKH Wirobrajan, dan masyarakat penerima KPM sudah cukup optimal. Berikut lebih lanjut analisis terhadap *collaborative governanace* dalam pengembangan E-Warong KUBE PKH Wirobrajan menggunakan teori menurut Ansell and Gash (2007)

1. *Face to face dialogue*

Telah diadakan forum tatap muka (*face to face dialogue*) berbentuk rapat bulanan seluruh *stakeholder* yang terlibat, rapat bulanan pengurus E-Warong bersama pendamping sosial, sosialisasi, pelatihan dan *workshop*

2. *Trust building*

Membangun kepercayaan antar *stakeholder* sudah berjalan dengan baik. Meskipun masing-masing *stakeholder* memiliki cara masing

masing untuk mencapai tujuan berdasarkan tupoksinya masing-masing.

3. *Commitment to the process*

Komitmen yang berjalan sudah efektif masing-masing *stakeholder* sudah menjalankan tugas maupun tanggungjawabnya dengan mengedepankan tujuan bersama.

4. *Shared understanding*

Pemahaman bersama dalam pengembangan E-Warong KUBE PKH Wirobrajan sudah optimal. Masing-masing *stakeholder* sudah memahami tujuan bersama dari pengembangan program.

5. *Intermediate outcomes*

tujuan dari pengembangan E-warong sudah mulai berjalan tetapi belum optimal. Masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu diperbaiki.

Saran

Berdasarkan penelitian tentang *collaborative governance* dalam Pengembangan E-Warong KUBE PKH Wirobrajan masih ada beberapa permasalahan, untuk memperbaiki permasalahan ke depannya peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Yogyakarta perlu melakukan pelatihan dan pendidikan untuk pengurus E-Warong dilakukan secara holistik baik dari aspek kelembagaan intern, manajemen keuangan, manajemen usaha dan aspek sosial
2. Bagi pihak swasta khususnya Bank BNI dan Koperasi Binus Kota Yogyakarta untuk melakukan Perbaikan kualitas saran dan prasarana

yang menunjang kegiatan E-Warong KUBE PKH.

3. Bagi masyarakat, khususnya untuk pengurus E-Warong untuk selalu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta atau *stakeholder* yang lain agar menjadi individu yang tangkas dalam untuk mengembangkan Program E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan jurnal :

Ansell, C. & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Jurnal of Publik Administration Research and Theory: J-PART*, Vol.18, No.4 (Oct,2008).

Bryson, J. M., B. C. Crosby and M. M. Stone (2006). "The design and implementation of Cross-Sector collaborations: Propositions from the literature." *Public administration review* 66(s1): 44-55.

Moleong, Lexy J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sudarmo.2011.*Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*.Solo: Smart Media.

Penelitian :

Handika Yogasulistyo. (2017). *Efektivitas E-Warong KUBE PKH Sejahtera dalam Mengoptimalkan Bantuan Non Tunai di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Devi. (2018). *collaborative governance dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtoharjo*,

Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat

Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan secara Non Tunai

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warong KUBE PKH

Website :

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/presentase-penduduk-miskinseptember-2017-mencapai-10-12-persen.html> diakses pada tanggal 20september 2018 pukul 20.31 WIB

<https://www.kemensos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada 25 September 2018 pukul 21.10 WIB

<https://www.liputan6.com/program-pengentas-kemiskinan-pemerintah-indonesia.html> diakses pada 01 Oktober 2018 pukul 20.08 WIB

[https://www.coursehero.com/file/p3vme7m/22-Pengertian-Kemiskinan-4-Hall-dan Midgley-200414-menyatakan-kemiskinan-dapat/](https://www.coursehero.com/file/p3vme7m/22-Pengertian-Kemiskinan-4-Hall-dan-Midgley-200414-menyatakan-kemiskinan-dapat/) diakses pada 20 Desember 2018 pukul 19.19 WIB